SNI

SNI ISO 22320:2012

Badan Standardisasi Nasional

Keamanan masyarakat — Manajemen kedaruratan — Persyaratan untuk penanganan insiden

Societal security — Emergency management — Requirements for incident response

(ISO 22320:2011, IDT)

ICS 03.100.01

© ISO 2011 – All rights reserved
© BSN 2012 untuk kepentingan adopsi standar ISO menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
Pendahuluan iii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Persyaratan untuk komando dan pengendalian 5
5 Persyaratan untuk informasi operasional 15
6 Persyaratan untuk kerjasama dan koordinasi 21
Lampiran A 29
Lampiran B 35
Bibliografi 42

© BSN 2012

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan judul *Keamanan masyarakat – Manajemen kedaruratan – Persyaratan untuk penanganan insiden* ini, merupakan adopsi identik dari ISO 22320:2011 (E) dengan judul *Societal security – Emergency management – Requirements for incident response* dengan cara terjemahan.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana, dan telah dikonsensuskan di Jakarta, pada tanggal 30 November 2012.Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

ISO 22320:2011 (E) telah terbit sebelum ISO 22300 sehingga dalam acuan normatif ISO 22320:2011 (E) masih tertulis ISO 22300,*Societal security - Vocabulary*, yang seharusnya tertulis ISO 22300:2012,*Societal security – Terminology*. Dikarenakan pada saat konsensus SNI ini dokumen ISO 22300:2012 telah terbit, maka judul ISO 22300 tersebut dituliskan sebagai *Societal security – Terminology.*

Sebagai informasi, ISO/PAS 22399 yang diacu didalam Pendahuluan sudah diadopsi identik menjadi SNI ISO/PAS 22399:2012,*Perlindungan masyarakat - Pedoman untuk manajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasional*.

Standar ISO yang digunakan dalam acuan normatif telah diadopsi menjadi SNI, yaituISO 22300:2012, *Societal security Terminologi (*dalam ISO 22320:2011 tidak bertanggal serta masih berjudul*Societal security Vocabulary)* telah diadopsi menjadi SNI ISO 22300:2013, *Keamanan masyarakat – Terminologi*.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu ISO 22320:2011 (E) dan/atau dokumen terkait lain yang menyertainya.

© BSN 2012

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak bencana, serangan teroris dan insiden besar lainnya yang kesemuanya menunjukkan bahwa betapa pentingnya penanganan insiden yang efektif untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi kerugian dan kerusakan, dan untuk menjamin kelangsungan fungsi-fungsi sosial mendasar yang penting.Fungsi-fungsi sosial tersebut mencakup jasa kesehatan dan penyelamatan, suplai air dan makanan, serta penyediaan listrik dan bahan bakar.Di masa lalu, fokus penanganan insiden umumnya bersifat nasional, regional atau dalam organisasi tertentu. Sekarang dan untuk masa depan ada kebutuhan penanganan secara multinasional dan multi-organisasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan dan saling ketergantungan antara pemerintah, non pemerintah, dunia komersial dan industri di seluruh dunia.

Standar ini memberikan panduan dalam meningkatkan kemampuan organisasi publik dan swasta yang menangani insiden untuk menangani semua jenis keadaan darurat (misalnya, krisis, gangguan dan bencana).Organisasi dan lembaga dapat berbagi beberapa fungsi penanganan insiden dengan sektor swasta dan pemerintah yang memiliki tingkat tanggung jawab berbeda.Jadi, dibutuhkan suatu panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan dan melaksanakan penanganan insiden yang efektif.Standar ini berupaya memberdayakan organisasi-organisasi yang terlibat, berdasarkan persyaratan minimum, untuk beroperasi bersama secara optimum.

Penanganan insiden yang efektif memerlukan komando dan pengendalian yang terstruktur, serta koordinasi dan kerja sama, dalam rangka membangun koordinasi dan kerja sama, melaksanakan proses komando dan memfasilitasi arus informasi di antara organisasi, lembaga dan pihak lain yang terlibat.

Bantuan lintas-organisasi, lintas-wilayah atau lintas-batas selama penanganan insiden ini diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terkena dampak dan juga secara budaya dapat diterima. Oleh karena itu partisipasi komunitas dalam pengembangan dan pelaksanaan tindakan penanganan insiden ini sangat penting.Organisasi yang terlibat harus mampu untuk berbagi metodologi umum yang bersifat lintas-batas geografis dan organisasi.

Persyaratan informasi, serta persyaratan yang berkaitan dengan proses dan struktur manajemen informasi, memungkinkan industri untuk mengembangkan solusi teknis yang akan memberikan kemampuan operasi antar organisasi yang maksimal sesuai dengan kebutuhan pertukaran informasi dan komunikasi selama penanganan insiden.

Kesiapsiagaan insiden yang efektif dan program manajemen kontinuitas operasional dapat diimplementasikan dengan menggunakan ISO/ PAS 22399, dan dengan melakukan latihan multi-organisasi secara teratur.

Standar ini dapat digunakan tersendiri atau bersama-sama dengan standar lainnya yang dikembangkan oleh ISO/TC 223.

Introduction

In recent years there have been many disasters, terrorist attacks and other major incidents which have shown the importance of effective incident response in order to save lives, mitigate harm and damage, and to ensure a base level of continuity of essential societal functions. Such functions include health and rescue services, water and food supply, and electricity and fuel delivery. While in the past the focus of incident response has been national, regional or within single organizations, today and for the future there is a need for a multinational and multi-organizational approach. This is a result of worldwide governmental, non-governmental, commercial and industrial relationships and dependencies.

This standard enables public and private incident response organizations to improve their capabilities in handling all types of emergencies (for example, crisis, disruptions and disasters). The multiple functions of incident response are shared between organizations and agencies, with the private sector and the government having different levels of responsibility. Thus there is a need to guide all involved parties in how to prepare and implement effective incident responses. This standard will, based on minimum requirements, enable organizations involved to operate with joint optimum efficiency.

Effective incident response needs structured command and control, and coordination and cooperation, in order to establish coordination and cooperation, carry out command processes and facilitate information flow amongst the involved organizations, agencies and other parties.

Cross-organization, -region or -border assistance during incident response is expected to be appropriate to the needs of the affected population and also to be culturally acceptable. Therefore community participation in the development and implementation of incident response measures is essential. Involved organizations require the ability to share a common approach across geographical and organizational boundaries.

Information requirements, as well as requirements pertaining to the information management process and structure, may enable industry to develop technical solutions which will provide maximal interoperability according to information and communication exchange needs during incident response.

An effective incident preparedness and operational continuity management programme can be implemented using ISO/PAS 22399, and by conducting regular multi-organizational exercises.

This standard can be used alone or together with the other standards developed by ISO/TC 223.

© BSN 2012

© BSN 2012

Keamanan masyarakat - Manajemen kedaruratan - Persyaratan untuk penanganan insiden

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan minimum untuk penanganan insiden yang efektif dan memberikan dasar bagi komando dan pengendalian, informasi operasional, koordinasi dan kerja sama dalam sebuah organisasi penanganan insiden, termasuk struktur dan prosedur organisasi komando dan pengendalian, dukungan keputusan, ketertelusuran, pengelolaan informasi, dan kemampuan operasi antar organisasi.

Standar ini menetapkan persyaratan bagi informasi operasional untuk menangani insiden yang menentukan proses, sistem kerja, pengambilan dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, relevan dan akurat.

Standar ini mendukung proses komando dan pengendalian serta koordinasi dan kerja sama, secara internal dalam organisasi maupun eksternal dengan pihak terlibat lainnya, dan menetapkan persyaratan untuk koordinasi dan kerja sama antar organisasi.

Standar ini berlaku untuk semua organisasi (swasta, publik, atau masyarakat) yang terlibat dalam mempersiapkan atau menangani insiden di tingkat internasional, nasional, regional atau lokal, termasuk organisasi yang

a) bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pencegahan insiden dan persiapan ketahanan,
b) menawarkan panduan dan pengarahan dalam penanganan insiden,
c) mengembangkan peraturan dan rencana untuk komando dan pengendalian,
d) mengembangkan koordinasi dan kerja sama multi-lembaga atau multi-organisasi untuk penanganan insiden,
e) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi untuk penanganan insiden,
f) meneliti di bidang penanganan insiden, informasi dan komunikasi serta model kemudahan data untuk dioperasikan bersama,
g) meneliti faktor manusia dalam mengangani insiden,
h) bertanggung-jawab atas komunikasi dan interaksi dengan publik.

2 Acuan normatif

Acuan berikut ini sangat diperlukan untuk penerapan standar ini.Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku.Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk amandemennya jika ada).

ISO 22300, *Societal security -Terminology*

3 Istilah dan definisi

Untuk keperluan standar ini, istilah dan definisi yang ada dalam ISO 22300 dan yang berikut ini berlaku.

Societal security — Emergency management — Requirements for incident response

1 Scope

This standard specifies minimum requirements for effective incident response and provides the basics for command and control, operational information, coordination and cooperation within an incident response organization. It includes command and control organizational structures and procedures, decision support, traceability, information management, and interoperability.

It establishes requirements for operational information for incident response which specifies processes, systems of work, data capture and management in order to produce timely, relevant and accurate information.

It supports the process of command and control as well as coordination and cooperation, internally within the organization and externally with other involved parties, and specifies requirements for coordination and cooperation between organizations.

This standard is applicable to any organization (private, public, governmental or non-profit) involved in preparing or responding to incidents at the international, national, regional or local levels, including organizations

a) responsible for, and participating in, incident prevention and resilience preparations,
b) offering guidance and direction in incident response,
c) developing regulations and plans for command and control,
d) developing multi-agency/multi-organizational coordination and cooperation for incident response,
e) developing information and communication systems for incident response,
f) researching in the field of incident response, information and communication and data interoperability models,
g) researching in the field of human factors in incident response,
h) responsible for communication and interaction with the public.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 22300, *Societal security — Terminology*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 22300 and the following apply.

© BSN 2012

3.1
komando dan pengendalian
kegiatan yang mencakup pengambilan keputusan yang berorientasi target, penilaian situasi, perencanaan, pelaksanaan keputusan dan pengendalian terhadap efek dari pelaksanaan insiden.

CATATAN Proses ini terus-menerus diulang.

3.2
sistem komando dan pengendalian
sistem yang mendukung manajemen kedaruratan yang efektif terhadap semua sumber daya yang tersedia dalam proses persiapan, penanganan insiden, kontinuitas dan/atau proses pemulihan

3.3
kerja sama
proses kerja atau tindakan bersama untuk kepentingan dan nilai bersama berdasarkan kesepakatan

CATATANOrganisasi menyetujui melalui kontrak, atau melalui pengaturan lain untuk berkontribusi dengan sumber daya mereka dalam menangani insiden, namun tetap mempertahanan kebebasan yang terkait dengan struktur hierarki internal mereka.

3.4
koordinasi
cara bekerja atau bertindak bersama dari organisasi yang berbeda (publik atau swasta) atau bagian dari organisasi yang sama untuk mencapai tujuan bersama

CATATAN1 Koordinasi adalah memadukan kegiatan penanganan masing-masing pihak yang terlibat (termasuk organisasi publik atau swasta dan pemerintah) untuk mencapai sinergi sejauh penanganan insiden itu memiliki tujuan bersama dan untuk mengkoordinasikan kegiatan melalui pertukaran informasi yang transparan mengenai masing-masing kegiatan penanganan insiden.

CATATAN2 Semua organisasi harus terlibat dalam proses untuk menyepakati tujuan penangan insiden bersama dan bersedia untuk melaksanakan strategi melalui proses pengambilan keputusan hasil kesepakatan ini.

3.5
manajemen kedaruratan
pendekatan menyeluruh dalam upaya mencegah keadaan darurat dan mengelolanya apabila keadaan darurat tersebut terjadi

CATATAN Secara umum, manajemen kedaruratan menggunakan pendekatan manajemen risiko untuk pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan sebelum, selama dan setelah kejadian yang berpotensi menyebabkan ketidak-stabilan dan/atau mengganggu.

3.6
komando insiden
bagian dari organisasi struktur penanganan insiden

CATATAN Komando insiden adalah proses yang dilakukan dalam struktur komando yang berkembang selama pengelolaan suatu insiden.

3.7
kesiapsiagaan insiden
kegiatan untuk mempersiapkan penanganan insiden

3.1
command and control
activities of target-orientated decision-making, assessing the situation, planning, implementing decisions and controlling the effects of implementation on the incident

NOTE This process is continuously repeated.

3.2
command and control system
system that supports effective emergency management of all available assets in a preparation, incident-response, continuity and/or recovery process

3.3
cooperation
process of working or acting together for common interests and values based on agreement

NOTE The organizations agree by contract or by other arrangements to contribute with their resources to the incident response but keep independence concerning their internal hierarchical structure.

3.4
coordination
way in which different organizations (public or private) or parts of the same organization work or act together in order to achieve a common objective

NOTE1Coordination integrates the individual response activities of involved parties (including public or private organizations and government) to achieve synergy to the extent that the incident response has a unified objective and to coordinate activities through transparent information sharing regarding their respective incident-response activities.

NOTE2All organizations are involved in the process to agree on a common incident-response objective and accept to implement the strategies by this consensus decision-making process.

3.5
emergency management
overall approach preventing emergencies and managing those that occur

NOTEIn general, emergency management utilizes a risk-management approach to prevention, preparedness, response and recovery before, during and after potentially destabilizing and/or disruptive events.

3.6
incident command
part of an organized incident response structure

NOTEIncident command is the process that is conducted within the command structures that evolve during the management of an incident.

3.7
incident preparedness
activities taken in order to prepare incident response

3.8
penanganan insiden
tindakan yang diambil untuk menghentikan penyebab bahaya mengancam dan/atau mengurangi konsekuensi dari kejadian yang berpotensi tidak stabil atau mengganggu, dan untuk memulihkan ke situasi normal

CATATAN Penanganan insiden merupakan bagian dari proses manajemen kedaruratan.

3.9
informasi
data yang diproses, disusun dan dikorelasikan untuk menghasilkan makna

3.10
informasi operasional
informasi yang telah disesuaikan dengan konteks dan dianalisis agar memberikan fakta tentang situasi dan perkembangan yang mungkin terjadi

3.11
organisasi
kumpulan orang dan sarana dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang dan hubungan

CONTOHPerusahaan, korporasi, firma, perusahaan gabungan, institusi, badan sosial, pedagang, asosiasi, badan atau bagian atau gabungan keduanya.

CATATAN 1 Pengaturannya biasanya tertib.

CATATAN 2 Organisasi bisa pemerintah atau swasta.

CATATAN 3 Definisi ini berlaku untuk tujuan standar sistem manajemen mutu. Istilah "organisasi" didefinisikan secara berbeda dalam ISO/IEC Guide 2.

[ISO 9000:2005, *definition* 3.3.1]

CATATAN 4 Suatu organisasi dapat berupa kelompok tetap atau ad-hoc yang dibentuk sementara untuk melakukan tugas tertentu dan terbatas.

4 Persyaratan untuk komando dan pengendalian

4.1 Umum

Secara umum, komando dan pengendalian meliputi tugas-tugas berikut:

a) menetapkan dan memperbarui tujuan dan sasaran untuk penanganan insiden;
b) menentukan peran, tanggung jawab dan hubungan antar peran;
c) menetapkan aturan, kendala dan jadual;
d) memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan kewajiban;
e) pemantauan, penilaian dan pelaporan mengenai situasi dan kemajuannya;
f) merekam keputusan dan asumsi utama;
g) mengelola sumber daya;
h) diseminasi informasi;
i) pengambilan dan penyampaian keputusan;
j) tindak lanjut dari keputusan yang diambil.

3.8
incident response
actions taken in order to stop the causes of an imminent hazard and/or mitigate the consequences of potentially destabilizing or disruptive events, and to recover to a normal situation

NOTE Incident response is part of the emergency management process.

3.9
information
data that are processed, organized and correlated to produce meaning

3.10
operational information
information that has been contextualized and analyzed to provide an understanding of the situation and its possible evolution

3.11
organization
group of people and facilities with an arrangement of responsibilities, authorities and relationships

EXAMPLESCompany, corporation, firm, enterprise, institution, charity, sole trader, association, agency or parts or combination thereof.

NOTE 1 The arrangement is generally orderly.

NOTE 2 An organization can be public or private.

NOTE 3 This definition is valid for the purposes of quality management system standards. The term “organization” is defined differently in ISO/IEC Guide 2.

[ISO 9000:2005, definition 3.3.1]

NOTE 4 An organization can be either a standing group or a temporary one established ad-hoc to perform a specific and limited task.

4. Requirements for command and control

4.1 General

In general, command and control includes the following tasks:

a) establishing and updating goals and objectives for the incident response;
b) determining roles, responsibilities and relationships;
c) establishing rules, constraints and schedules;
d) ensuring legal compliance and liability protection;
e) monitoring, assessing and reporting on the situation and progress;
f) recording key decisions and assumptions;
g) managing resources;
h) dissemination of information;
i) taking and communicating decisions;
j) follow-up of decisions taken.

Ketika beberapa organisasi, atau bagian yang berbeda dari satu organisasi, terlibat dalam penanganan insiden

— konsensus antara organisasi yang terlibat mengenai tujuan keseluruhan misi harus dicapai,
— struktur dan proses harus memungkinkan keputusan operasional diambil pada tingkat serendah mungkin, sedangkan koordinasi dan dukungan diberikan dari tingkat yang setinggi mungkin,
— kewenangan dan sumber daya harus sesuai dengan misi ini, dan
— organisasi harus mendorong partisipasi komunitas dalam pengembangan dan implementasi tindakan penanganan insiden.

4.2 Sistem komando dan pengendalian

4.2.1 Umum

Tujuan dari sistem komando dan pengendalian adalah agar organisasi dapat melakukan penanganan insiden yang efisien, mandiri maupun bersama-sama dengan semua pihak terlibat lainnya, untuk mendukung semua tindakan penyelamatan jiwa dan membatasi efek buruk.

Untuk tujuan penanganan insiden, organisasi harus menerapkan sistem komando dan pengendalian yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan serta sesuai dengan persyaratan standar ini.

Seiring dengan pengaturan dari sistem komando dan pengendalian, organisasi harus secepat mungkin menentukan garis komando berikut ini baik di dalam organisasi itu sendiri maupun dengan organisasi, pelaku, dan pihak lain yang terlibat (misalnya penunjukan seorang komandan insiden):

a) pemahaman umum mengenai tujuan misi;
b) gambaran operasional umum;
c) hubungan dengan organisasi lain yang tidak berada dalam garis komando;
d) penunjukan orang dengan wewenang yang tepat untuk bertanggung jawab atas kepemimpinan.

Semua masalah di atas harus diperhitungkan selama perencanaan dan latihan.

Sistem komando dan pengendalian harus

— dapat disesuaikan untuk jenis kejadian dan organisasi berbeda yang terlibat dalam penanganan insiden,
— mudah beradaptasi dengan semua jenis insiden,
— mampu mengintegrasikan organisasi dan pihak berbeda yang terlibat dalam penanganan insiden, dan
— dapat disesuaikan dengan perkembangan insiden dan terhadap akibat dari penanganan insiden.

Untuk memenuhi tugas tersebut sistem komando dan pengendalian harus mencakup

— struktur komando dan pengendalian,
— proses komando dan pengendalian, dan
— sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan struktur dan proses komando.

When multiple organizations, or different parts of one organization, are involved in the incident response

— consensus should be sought on overall mission objectives among involved organizations,
— structures and processes should permit operational decisions to be taken at the lowest possible level, and coordination and support offered from the highest necessary level,
— authority and resources shall be appropriate to this mission, and
— organizations shall encourage community participation in the development and implementation of incident response measures.

4.2 Command and control system

4.2.1 General

The objective of a command and control system is to enable organizations to carry out efficient incident responses, independently as well as jointly, with all other involved parties, in order to support all measures to save lives and limit adverse effects.

For the purpose of incident response the organization shall implement a command and control system which complies with relevant legislation and regulations as well as with the requirements of this standard.

Along with the setting up of a command and control system, the organization shall, as quickly as possible, determine the following lines of command both within the organization and with other organizations, actors and involved parties (e.g. designation of an incident commander):

a) a common understanding of the mission's purpose;
b) a common operational picture;
c) relations to other organizations that are not within the line of command;
d) appointment of persons with appropriate delegated authority to be accountable for leadership.

All of the above issues shall be taken into account during planning and exercises.

The command and control system shall be

— scalable for different incident types and involved organizations,
— adaptable to any type of incident,
— able to integrate different incident response organizations and involved parties, and
— flexible to the evolution of the incident and the outcome of incident responses.

To fulfill these tasks a command and control system shall include

— a command and control structure,
— a command and control process, and
— the resources necessary to implement the command structure and process.

Struktur organisasi dan proses dari sistem komando dan pengendalian harus didokumentasikan.

CATATAN Jumlah orang, peran dan tanggung jawab dalam organisasi komando dan pengendalian mungkin berbeda, tergantung pada ukuran kejadian.

4.2.2 Posisi dan tanggung jawab

Salah satu posisi dalam organisasi, yaitu komandan insiden, harus dianggap sebagai orang yang memiliki tanggung jawab menyeluruh atas komando dan pengendalian dalam organisasi itu. Komandan insiden ini harus bertanggung jawab untuk

— memulai, mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas semua tindakan penanganan insiden,
— menetapkan suatu pengaturan,
— mempertimbangkan proses pengaktifan, peningkatan dan penghentian, dan
— mengidentifikasi serta memenuhi kewajiban hukum dan lainnya.

Struktur komando dan pengendalian harus disusun sedemikian rupa sehingga komandan insiden dapat mendelegasikan wewenangnya.

4.2.3 Struktur komando dan pengendalian

Struktur komando dan pengendalian harus dibagi menjadi beberapa tingkatan (misalnya tingkatan taktis, operasional, strategis dan normatif) yang di dalamnya berbagai jenis keputusan diambil dalam rentang waktu yang berbeda. Sebuah contoh diberikan dalam Tabel A.1.

4.2.4 Tingkat penanganan insiden

Sesuai dengan struktur komando strategis dan taktis yang telah ditetapkan, organisasi harus mengkategorikan skala tingkat keparahan insiden. Tujuannya adalah untuk melaksanakan sesegera mungkin komando dan pengendalian pada tingkat yang memadai. Sebuah contoh diberikan dalam Tabel A.2.

4.2.5 Proses komando dan pengendalian

Organisasi harus menetapkan proses komando dan pengendalian yang sedang berlangsung dan mencakup kegiatan berikut ini:

— pengamatan/observasi;
— pengumpulan, pengolahan dan pertukaran informasi;
— penilaian situasi, termasuk prakiraan;
— perencanaan;
— pengambilan keputusan dan penyampaian keputusan yang diambil;
— pelaksanaan keputusan;
— pengumpulan umpan balik dan tindakan pengendalian.

Proses komando dan pengendalian tidak boleh terbatas pada tindakan komandan insiden saja tetapi juga berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam tim komando insiden, di semua tingkatan tanggung jawab.

Contoh proses komando dan pengendalian untuk insiden yang melibatkan organisasi di bawah perintah hierarki tunggal diberikan pada Gambar 1.

The organizational structure, and the processes of the command and control system, shall be documented.

NOTE The number of persons, roles and responsibilities involved in the command and control organization may differ, depending on the scale of the incident.

4.2.2 Roles and responsibilities

One role within the organization, i.e. the incident commander, shall be identified as having the overall responsibility for command and control within that organization. This role shall have responsibility for

— initiating, coordinating and taking responsibility for all measures of incident response,
— setting up an organization,
— considering the activation, escalation and termination processes, and
— identifying and meeting legal and other obligations.

The command and control structure shall be organized in such a way that the incident commander can delegate authority.

4.2.3 Command and control structure

The command and control structure shall be divided into different levels (e.g. tactical, operational, strategic and normative levels) where different types of decisions are taken within different timescales. An example is given in Table A.1.

4.2.4 Levels of incident response

Corresponding to the predefined strategic and tactical command structure, the organization shall categorize a scale of incident severity levels. This
is in order to implement, as soon as reasonably practicable, the appropriate level of command and control. An example is given in Table A.2.

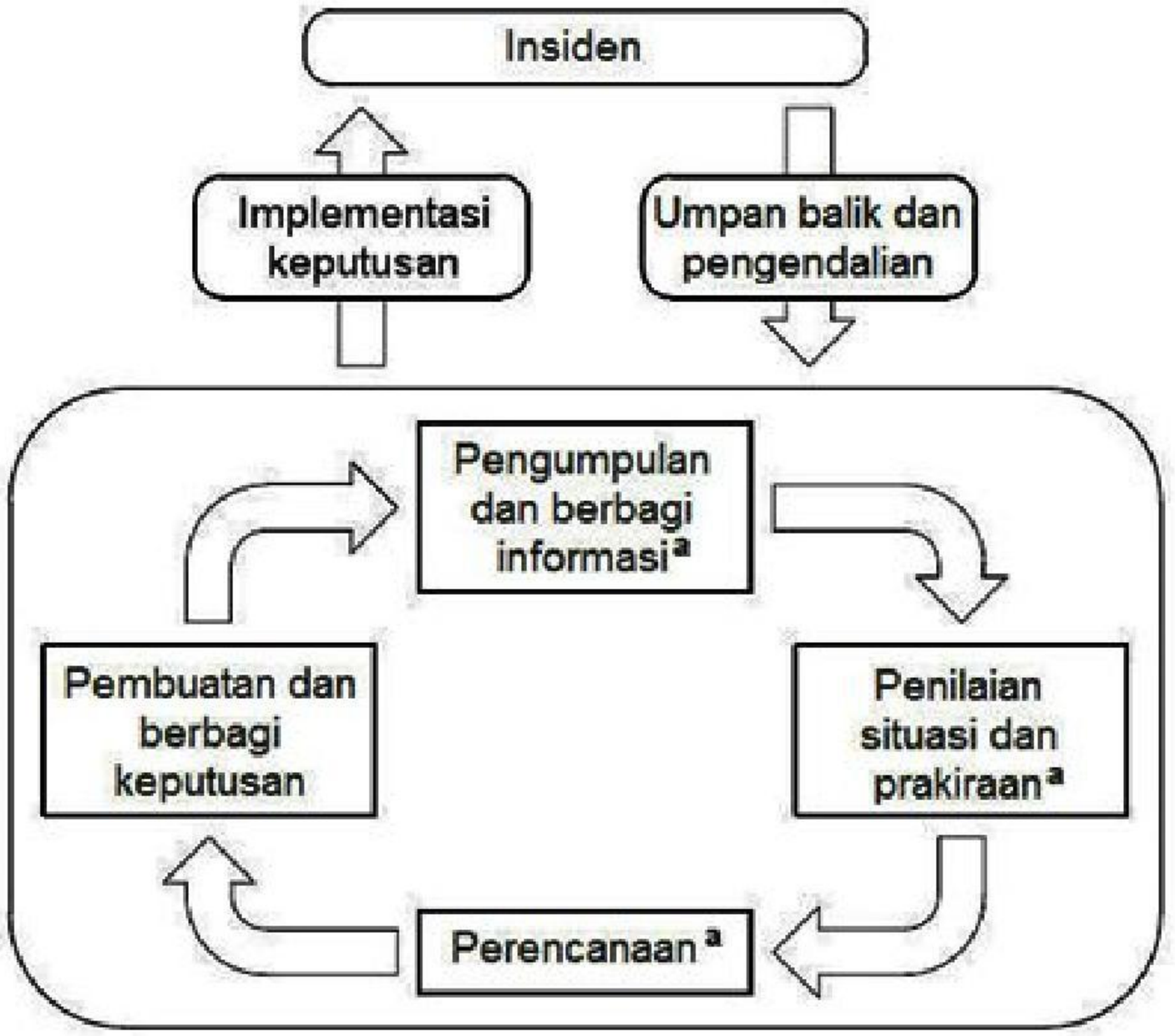
4.2.5 Command and control process

The organization shall establish a command and control process which is ongoing and includes thefollowing activities:

— observation;
— information gathering, processing and sharing;
— assessment of the situation, including forecast;
— planning;
— decision-making and the communication of the decisions taken;
— implementation of decisions;
— feedback gathering and control measures.

The command and control process shall not be limited to the actions of the incident commander but shall also be applicable to all persons involved in the incident command team, at all levels of responsibility.

An example of a command and control process for an incident involving organization(s) under a single hierarchy command is given in Figure 1.



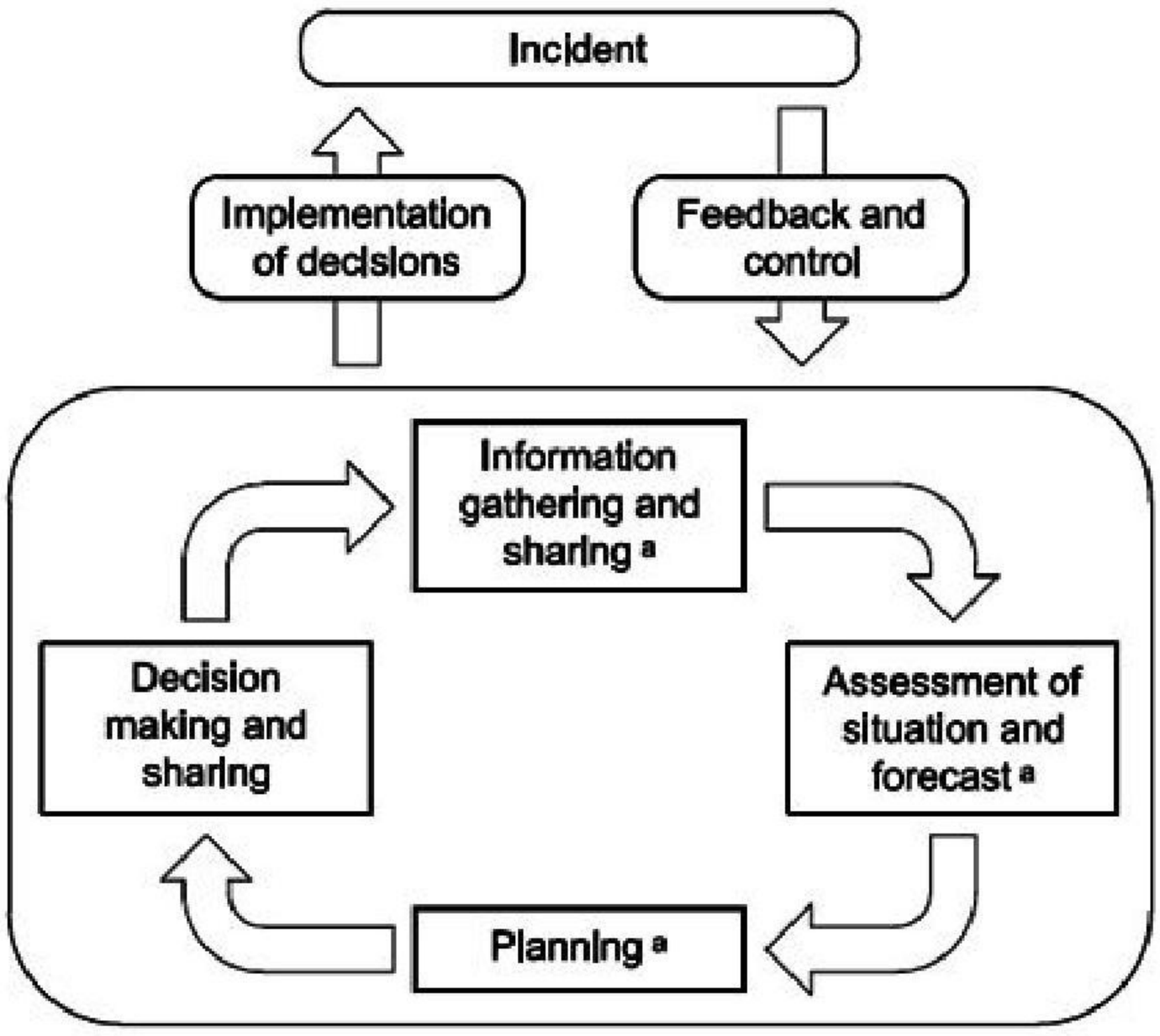
[a] Dengan kebutuhan terbatas akan koordinasi dengan rekanan di luar oganisasi

Gambar 1 - Contoh proses komando dan pengendalian dalam organisasi hierarki tunggal dengan kebutuhan koordinasi terbatas

CATATAN Prinsip komando dan pengendalian, koordinasi dan kerja sama berlaku untuk semua organisasi, baik yang memiliki struktur hierarki tunggal maupun berganda. Dalam struktur komando dan pengendalian hierarki berganda, prinsip koordinasi dan kerja sama memiliki relevansi lebih mendalam.

Dalam proses komando dan pengendalian, peran kunci dan tanggung jawab harus sesuai dengan ukuran kejadian dan harus mencakup setidaknya fungsi berikut:

a) personel, administrasi dan keuangan;
b) kesadaran situasional dan perkiraan;
c) operasi (perencanaan, pengambilan keputusan, perekaman dan implementasi);
d) logistik;
e) media dan pers;
f) komunikasi dan transmisi;
g) penghubung (misalnya antara organisasi dan LSM);
h) sinyal dan kontak (yaitu memberikan informasi kepada publik);
i) keselamatan (misalnya kesehatan dan keselamatan personel di tempat kejadian).



a With limited need for coordination with partners outside the organization.

Figure 1 - Example of command and control process in single hierarchical organization with limited coordination needs

NOTE The principles of command and control, coordination and cooperation apply to all organizations, whether they have a single or multiple hierarchical structures. In multiple hierarchical command and control structures the principles of coordination and cooperation are of enhanced relevance.

Within the command and control process, the key roles and responsibilities should be appropriate to the scale of the incident and should include at least the following functions:

a) personnel, administration and finance;
b)
c) situational awareness and forecast;
d) operation (planning, decision-making, recording and implementation);
e) logistics;
f) media and press;
g) communications and transmission;
h) liaison (e.g. between responding organizations and NGOs);
i) alerting and contact (i.e. providing information to the public);
j) safety (e.g. health and safety of on-site personnel).

4.2.6 Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan harus sejelas mungkin. Pengambilan keputusan harus dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada organisasi lainnya yang terlibat, serta untuk umum, jika perlu.

4.2.7 Sumber daya komando dan pengendalian

Organisasi harus menetapkan lokasi dan fasilitas yang layak untuk pengambilan keputusan dan penggunaan peralatan, serta proses untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Jika perlu dapat dibentuk sebuah pusat kendali.

Pos komando untuk pelaksanaan fungsi komando dan pengendalian dapat bersifat bergerak atau stasioner. Jika perlu, pos sub-komando dapat didirikan baik di tempat kejadian atau di luar.

4.3 Faktor manusia

Faktor manusia sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menangani insiden sehingga organisasi dapat berjalan dan memenuhi tujuan misi tanpa kegagalan akibat terbatasnya manusia. Kegiatan penanganan insiden harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh budaya dan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terkena dampak.

Organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor manusia berikut ini dan harus mengambil tindakan yang tepat, misalnya:

— pembagian beban kerja,
— kesehatan dan keselamatan,
— rotasi personel,
— desain sistem perantara manusia dan mesin.

Ketika menentukan dan merancang struktur komando dan pengendalian, proses dan peralatan (terutama untuk penggunaan multi-organisasi maupun antar negara), harus diperhitungkan perbedaan di antara pengguna seperti misalnya tingkat kompetensi, latar belakang budaya, kemampuan bahasa dan protokol operasi.

Semua pelaku yang terlibat harus dapat memahami posisinya yang tepat di dalam struktur operasional secara keseluruhan dan harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk menangani sumber daya yang ada di bawah kendali mereka melalui pelatihan dan latihan. Ketika merancang sistem perantara manusia dan mesin, kemampuan pelaku, karakteristik, keterbatasan, keterampilan, dan kebutuhan tugas harus menjadi pertimbangan utama. Apabila sistem elektronik dan/atau mekanik adalah bagian dari struktur komando dan pengendalian, operator manusia harus menjadi otoritas tertinggi dalam sistem manusia-mesin, kecuali jika dinyatakan terlarang.

Langkah yang tepat harus diambil untuk mengatasi ketegangan spiritual, emosional dan psikologis yang dialami oleh setiap pelaku.

4.2.6 Decision-making

Decision-making should be as clear and transparent as possible. The decision-making should be communicated within the organization and to other involved organizations, as well as to the public, where appropriate.

4.2.7 Command and control resources

The organization shall establish appropriate locations and facilities for decision-making and the use of equipment, as well as a process to ensure that resources are available and functional according to need. This may involve the establishment of a control centre.

A command post from which the command and control functions are carried out may be either mobile or stationary. If appropriate, subcommand posts may be established either on-site or off-site.

4.3 Human factors

It is essential to consider the human role in incident response so that organizations can operate and meet the mission objectives without failure due to human limitations. Incident response activities shall be performed in a culturally acceptable way and appropriate to the needs of the affected population.

The organization shall consider the following human factors and shall take appropriate actions, e.g.

— workload distribution,
— health and safety,
— rotation of personnel,
— the design of human–machine–system interfaces.

When specifying and designing command and control structures, processes and equipment (especially for multi-organizational or cross-border use), account shall be taken of user differences such as competency levels, cultural backgrounds, language skills and operating protocols.

All actors involved shall be able to maintain an understanding of where they fit into the overall operational structure and shall have the appropriate competencies to handle the assets under their control through training and exercises.

When designing human–system interfaces, the actor's abilities, characteristics, limitations, skills, and task needs shall be primary considerations. Where electronic and/or mechanical systems are a part of a command and control structure, the human operator should be the highest authority in the human–machine–system, unless otherwise prohibited.

Suitable measures shall be taken to deal with spiritual, emotional and psychological stress experienced by any actors.

© BSN 2012

5 Persyaratan untuk informasi operasional

5.1 Umum

Informasi operasional diperlukan pada saat penanganan insiden agar kegiatan tersebut dapat dikelola secara efektif. Informasi operasional membantu dalam membangun kesadaran mengenai situasi, pengorganisasian sumber daya dan pengendalian kegiatan. Informasi operasional adalah hasil dari pengolahan informasi tentang kejadian, lokasi dan kegiatan penanganan insiden (lihat Gambar 2). Informasi operasional dapat dihasilkan secara dinamis akibat kejadian atau berupa informasi statis yang terkait dengan lokasi, yaitu bangunan, infrastruktur, penduduk.

CATATANInformasi operasional memberikan dasar bagi penilaian situasi dan memudahkan penyelesaian misi. Produksi, integrasi dan diseminasi informasi operasional (seperti dijelaskan dalam butir 4.2) merupakan elemen penting dalam komando dan pengendalian.



Gambar 2 - Proses penyediaan informasi opersional

5. Requirements for operational information

5.1 General

Operational information is required during incident response in order to effectively manage incident response activities. It assists in building situational awareness, organizing resources and controlling activities. Operational information results from the processing of information (see Figure 2) concerning the incident, its location and incident response activities. Operational information can be generated dynamically by the incident or given as static information related to the location, i.e. buildings, infrastructure, population.

NOTEOperational information provides the basis for assessment of the situation and facilitates the accomplishment of the mission. The production, integration and dissemination of operational information (as described in 4.2) are an essential element in command and control.



Figure 2- Process of providing operational information

5.2 Proses informasi operasional

5.2.1 Umum

Organisasi harus menetapkan proses yang berkelanjutan untuk menyediakan informasi operasional, yang meliputi kegiatan berikut ini:

a) perencanaan dan pengarahan;
b) pengumpulan;
c) pengolahan dan eksploitasi;
d) analisis dan produksi;
e) diseminasi dan pengintegrasian;
f) evaluasi dan umpan balik.

CATATAN Kegiatan ini dapat terjadi secara serentak.

5.2.2 Perencanaan dan arahan

Informasi operasional harus direncanakan dan dipersiapkan sebagai bagian dari proses komando dan pengendalian (lihat butir 4.2.5).

Perencanaan dan pengarahan antara lain meliputi kegiatan berikut ini:

a) pemberian arahan dan tujuan misi untuk pelaksanaan operasi penanganan;
b) penentuan pertanyaan kunci untuk pengambilan keputusan yang efisien;
c) perencanaan pengumpulan informasi berikut panduan untuk cara pengumpulan dan hasil;
d) perencanaan penyimpanan, eksploitasi, hak akses, dan pembatasan informasi (desain database, format data, alat komunikasi, dll);
e) identifikasi kebutuhan informasi dari pihak yang terlibat;
f) identifikasi kendala waktu pada informasi yang diperlukan;
g) penetapan persyaratan dan protokol diseminasi (teknis dan non-teknis);
h) perencanaan sumber daya manusia untuk pengolahan informasi operasional;
i) perencanaan peralatan pengolah informasi dan manajemen operasionalnya.

5.2.3 Pengumpulan

Pengumpulan meliputi kegiatan yang terkait dengan perolehan informasi operasional, misalnya untuk menentukan arah, penjadualan, dan pengendalian sumber informasi tertentu.

Pengumpulan antara lain meliputi kegiatan berikut ini:

a) identifikasi sumber-sumber informasi yang dapat diakses;
b) perolehan informasi;
c) pencatatan dan pembukuan informasi yang diperoleh, termasuk identifikasi asal-usul dan waktunya.

5.2 Operational information process

5.2.1 General

The organization shall establish an ongoing process for providing operational information, including the following activities:

a) planning and direction;
b) collection;
c) processing and exploitation;
d) analysis and production;
e) dissemination and integration;
f) evaluation and feedback.

NOTE These activities can take place simultaneously.

5.2.2 Planning and direction

Operational information shall be planned and prepared as part of the command and control process (see 4.2.5).

The following activities shall be included:

a) provisions of direction and mission objectives for the conduct of response operations;
b) specification of key questions for efficient decision-making;
c) planning of information collection with guidelines for collection methods and outcomes;
d) planning of information storage, exploitation, access rights and restrictions (database design, data formats, communication means, etc.);
e) identification of the information needs of involved parties;
f) identification of time constraints on the information required;
g) determination of dissemination requirements and protocols (technical and non-technical);
h) planning of human resources for the processing of operational information;
i) planning of information-processing equipment and its operational management.

5.2.3 Collection

Collection includes those activities related to the acquisition of operational information, e.g. to determine the direction, scheduling, and control of specific information sources.

The following activities shall be included:

a) identification of accessible information sources;
b) acquisition of information;
c) recording and logging of the information obtained, including the identification of sources and time.

5.2.4 Pengolahan dan eksploitasi

Selama pengolahan dan eksploitasi data, data yang terkumpul dikonversi ke dalam format yang memudahkan untuk segera digunakan oleh pengambil keputusan di semua tingkat dan oleh pengguna lain yang membutuhkan informasi operasional.

a) mengadaptasikan informasi ke dalam format yang sesuai agar diseminasinya efektif;
b) evaluasi awal informasi (tingkat keabsahan dan kepercayaan sumbernya), yang contohnya diberikan dalam Tabel A.3;
c) penghapusan informasi yang tidak berguna, tidak relevan atau tidak benar;
d) indikasi tingkat diseminasi (termasuk tingkat klasifikasi);
e) evaluasi terhadap kredibilitas informasi, yang contohnya diberikan dalam Tabel A.4.

5.2.5 Analisis dan produksi

Selama analisis dan produksi, semua informasi yang tersedia harus diintegrasikan, dievaluasi, dianalisis, dan ditafsirkan untuk menciptakan informasi operasional.Keluarannya harus sesuai dengan persyaratan prioritas atau permintaan komandan insiden.

Analisis dan produksi antara lain meliputi kegiatan berikut ini:

a) revisi informasi;
b) pengutamaan dan kategorisasi informasi;
c) perbandingan, penyusunan dan sintesis informasi;
d) identifikasi risiko dan analisis risiko;
e) kesimpulan tentang kemungkinan hasil, dan kecenderungannya;
f) pembuatan proposal, rekomendasi, laporan dan pengolahan informasi output lain.

5.2.6 Diseminasi dan integrasi

Dalam tahap diseminasi dan pengintegrasian, informasi operasional disampaikan berdasarkan kategorinya dan digunakan oleh pengambil keputusan dan pengguna lainnya. Diseminasi difasilitasi dengan berbagai cara. Cara tersebut tergantung pada kebutuhan pengguna, implikasi dan kekritisan informasi operasional, serta alat transmisi yang tersedia.

Diseminasi dan integrasi antara lain mencakup kegiatan berikut ini:

— Diseminasi yang sesuai dengan persyaratan tertentu (teknis dan/atau non-teknis), protokol yang mana yang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dapat diakses oleh semua pengguna informasi operasional;
— Integrasi informasi operasional ke dalam citra operasional pengguna.

5.2.7 Evaluasi dan umpan balik

Selama evaluasi dan umpan balik organisasi harus melakukan penilaian di semua tingkatan untuk melihat seberapa baik aktivitas yang terlibat dengan penyediaan informasi operasional yang sedang berlangsung.Berdasarkan evaluasi ini, dan umpan balik yang dihasilkan, tindakan korektif harus dimulai, sesuai dengan kebutuhan, untuk memperbaiki kualitas prosesnya.

5.2.4 Processing and exploitation

During processing and exploitation, collected data is converted into formats that can be readily used by decision-makers at all levels and other users with operational information needs.

The following activities shall be included:

a) adaption of the information into a relevant format(s) for effective dissemination;
b) initial evaluation of the information (the rating of its validity and reliability of its source), an example of which is given in Table A.3;
c) elimination of useless, irrelevant or incorrect information;
d) indication of the level of dissemination (including classification level);
e) evaluation of the credibility of the information, an example of which is given in Table A.4.

5.2.5 Analysis and production

During analysis and production, all available processed information is integrated, evaluated, analysed, and interpreted to create operational information. The outputs shall satisfy the incident commander's priority requirements or request for information.

The following activities shall be included:

a) revision of information;
b) prioritization and categorization of the information;
c) collation, assembly and synthesizing of the information;
d) risk identification and risk analysis;
e) inference of likely outcomes, deduction of trends;
f) production of proposals, recommendations, reports and other information-processing outputs.

5.2.6 Dissemination and integration

During dissemination and integration, operational information is delivered based on its categorization and used by decision-makers and other users. Dissemination is facilitated by a variety of means. The means are determined by the needs of the users, the implications and criticality of the operational information, and the available transmission means.

The following activities shall be carried out:

— dissemination in accordance with specified dissemination requirements (technical and/or non-technical), which protocols should be established, documented and accessible by all operational information users;
— integration of the operational information into the user's operational picture.

5.2.7 Evaluation and feedback

During evaluation and feedback the organization shall make an assessment at all levels to see how well the activities involved with providing of operational information are being performed. Based on these evaluations, and any resulting feedback, corrective actions should be initiated, as required, to improve the process.

5.3 Kriteria proses informasi operasional

Organisasi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut dalam proses informasi operasional:

— kualitas;
— perspektif;
— sinkronisasi;
— integritas;
— koordinasi dan kerja sama;
— pengutamaan;
— prediksi;
— kelincahan;
— kerja sama;
— fusi/penggabungan

CATATAN Lihat Lampiran B untuk penjelasan dan persyaratan lebih lanjut.

6 Persyaratan untuk kerjasama dan koordinasi

6.1 Umum

Untuk mencapai penanganan insiden efektif berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai bersama, perjanjian kerja sama yang diperlukan harus ditetapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan insiden bila sesuai. Kerja sama ini harus didasarkan pada risiko yang teridentifikasi dan konsekuensi dari skenario kejadian yang mungkin bagi organisasi.

Misalnya, kerja sama diperlukan antara

— negara, pemerintah propinsi atau otoritas publik dalam hal bantuan timbal balik pada bencana skala besar dengan layanan publik mereka,
— pemerintah pada beberapa tingkat yang berbeda dengan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan sumber daya penanganan insiden (misalnya perjanjian dengan stasiun radio untuk penyiaran peringatan dan informasi, perjanjian umum dengan organisasi non-pemerintah),
— pemerintah dengan industri swasta untuk kegiatan pendukung penanganan insiden (misalnya makanan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, transportasi, komunikasi),
— pemerintah dengan industri swasta untuk memberikan ketahanan tingkat tertentu terhadap bencana, jika tidak diharuskan oleh hukum (misalnya pemberian obat-obatan, vaksin, kapasitas pasokan listrik darurat, distribusi air minum), dan
— pihak-pihak dalam industri swasta, untuk saling membantu dalam menjamin kelanjutan produksi dan pengiriman produk yang relevan dengan penanganan insiden.

6.2 Kerja sama

Organisasi harus:

— menilai perlunya kerja sama dengan organisasi lain, peran dan pihak yang terlibat untuk mempersiapkan penanganan insiden secara efektif,
— membangun kesepakatan kerja sama berdasarkan penilaian tersebut,
— mendorong integrasi mitra kerja sama ke dalam proses komando dan pengendalian dengan pertukaran pakar jika diperlukan, dan
— menguji, mengevaluasi dan merevisi perjanjian kerja sama pada kurun waktu yang ditentukan oleh organisasi.

5.3 Operational information process criteria

The organization shall ensure within the operational information processes that the following criteria are considered:

— quality;
— perspective;
— synchronization;
— integrity;
— coordination and cooperation;
— prioritization;
— prediction;
— agility;
— collaboration;
— fusion.

NOTE See Annex B for further explanations and requirements.

6 Requirements for cooperation and coordination

6.1 General

In order to achieve effective incident response based on common interest and values, necessary cooperation agreements shall be established as a part of the incident preparedness where appropriate. This cooperation should be based on identified risks and consequences of possible incident scenarios for the organization.

For example, cooperation is needed between

— states, federal states or public authorities concerning mutual assistance in large scale disasters with their public services,
— governments on different levels with non-governmental organizations to provide incident response resources (e.g. agreements with radio stations for broadcasting warning and information, general agreements with non-governmental organizations),
— governments with private industry for incident response support activities (e.g. food, shelter, health services, transportation, communications),
— government with private industry to provide a certain level of disaster resilience, if not required by law (e.g. delivery of medicaments, vaccine, emergency power supply capacity, drinking water distribution), and
— within private industry, to provide mutual assistance to ensure continuation of production and delivery of incident-response-relevant products.

6.2 Cooperation

The organization shall

— assess the need for cooperation with other organizations, actors and involved parties to prepare effective incident response,
— establish cooperation agreements based on the assessment,
— enable integration of the cooperation partners into the command and control process by exchanging experts where appropriate, and
— test, evaluate and revise cooperation agreements at intervals specified by the organization.

6.3 Koordinasi

6.3.1 Umum

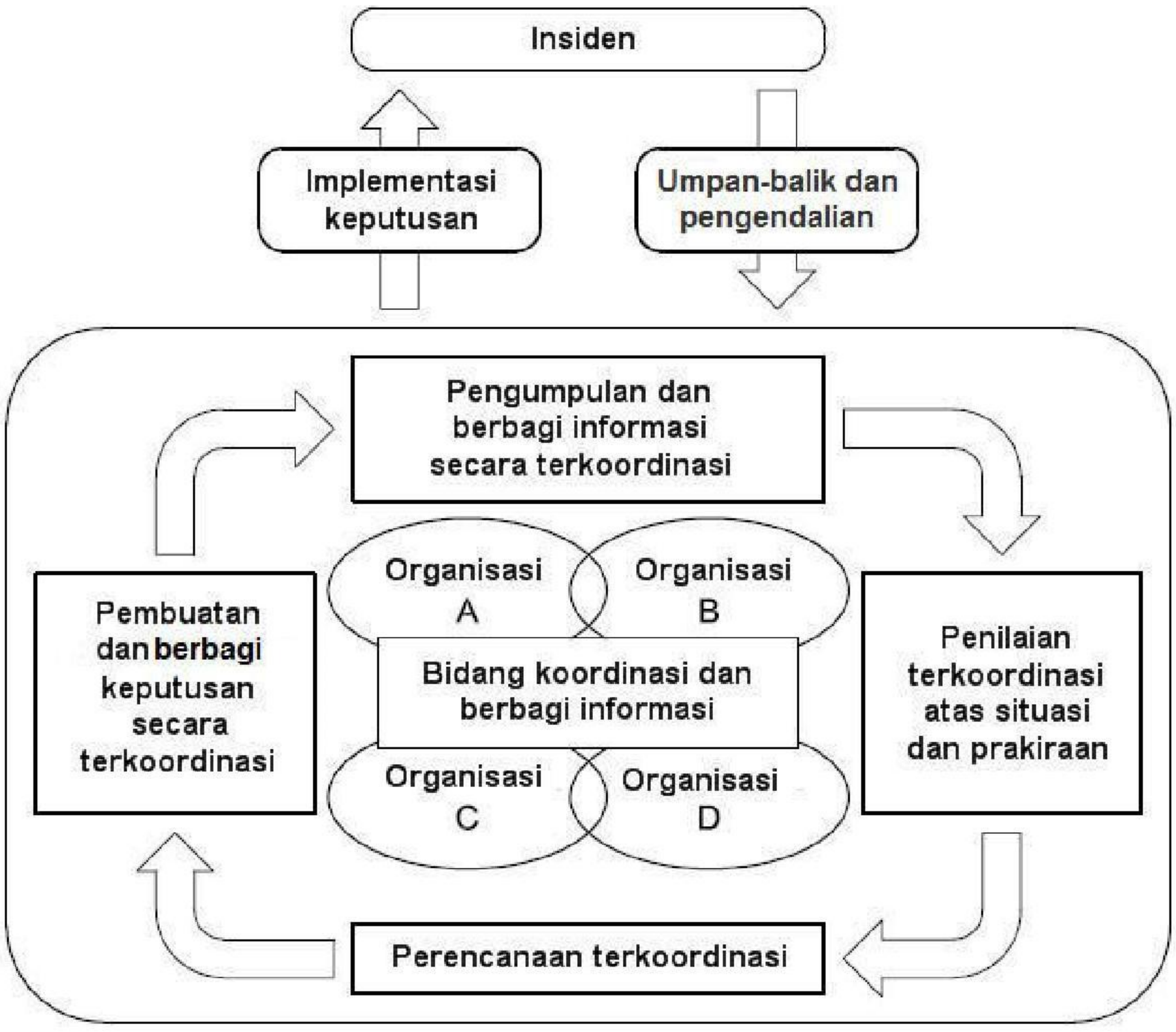
Organisasi harus menilai perlunya koordinasi dengan pelaku dan pihak terkait dan membangun kerja sama yang penting dan diperlukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan insiden. Koordinasi ini harus didasarkan pada risiko yang teridentifikasi dan konsekuensi dari skenario insiden yang mungkin bagi organisasi.Koordinasi tersebut sebaiknya menghasilkan peringanan insiden secara manusiawi, netral dan tidak memihak.

Organisasi harus menerapkan hubungan kerja yang aktif dengan pelaku dan pihak terkait untuk

— berbagi informasi,
— berkontribusi terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan,
— melaksanakan keputusan manajemen darurat, dan
— mengulangi proses tersebut jika diperlukan.

Harus ada pertukaran pakar jika diperlukan.

Gambar 3 menunjukkan proses hierarki beberapa komando dan pengendalian dengan relevansi koordinasi yang makin membaik.



Gambar 3 - Diagram lingkar untuk proses komando dan pengendalian hierarki ganda dengan relevansi koordinasi yang lebih mendalam

6.3 Coordination

6.3.1 General

The organization shall assess the need of coordination with the relevant actors and parties and establish essential and necessary cooperation as a part of the incident preparedness. This coordination should be based on identified risks and consequences of possible incident scenarios for the organization. Coordination should result in humane, neutral and impartial incident relief.

The organization shall implement active working relationships with the relevant actors and parties in order to

— share information,
— contribute to the planning and decision-making process,
— implement the emergency's management decisions, and
— repeat the process as long as needed.

There shall be an exchange of experts where appropriate.

Figure 3 shows the multiple hierarchical command and control process with increased relevance of coordination.

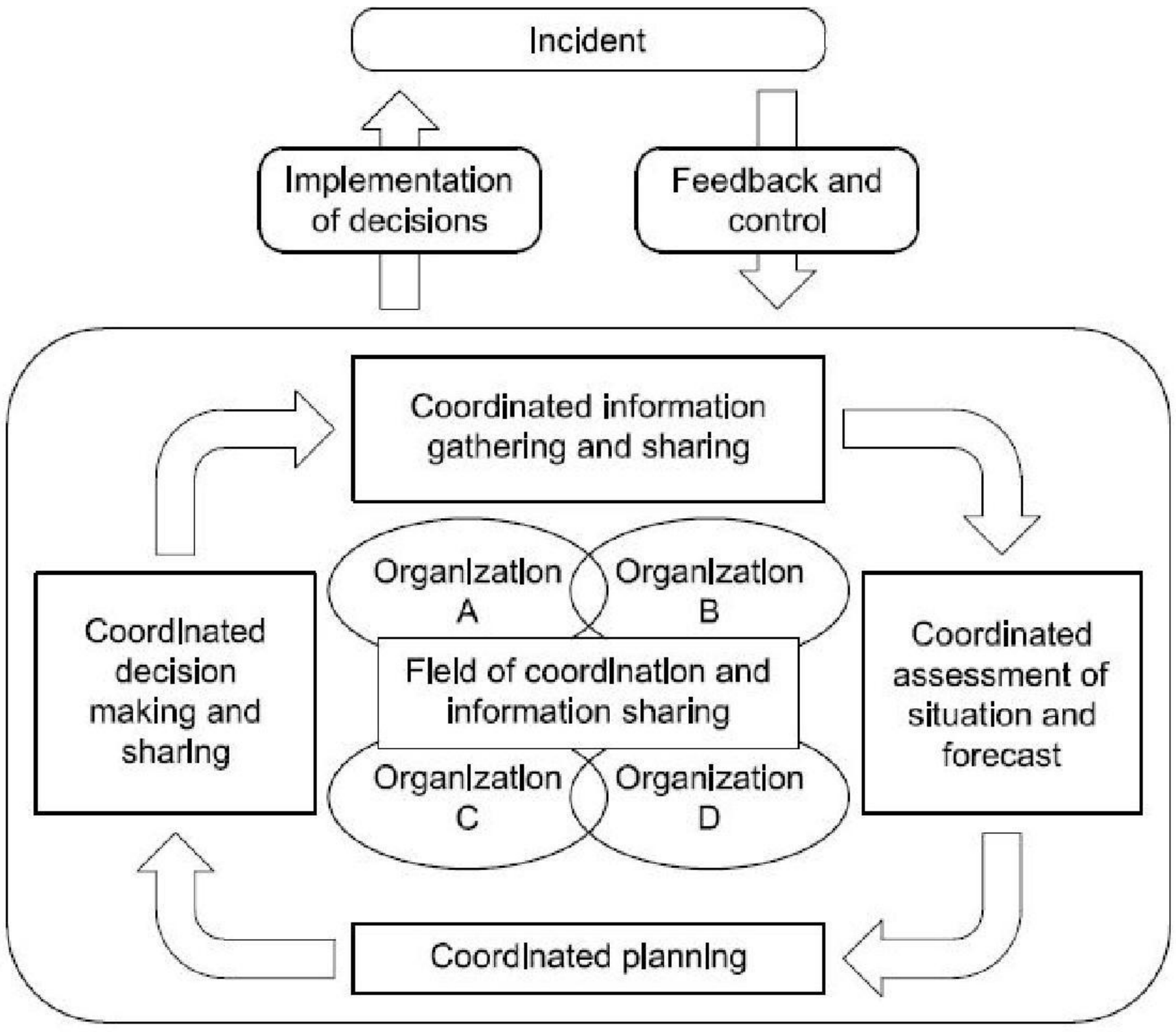


Figure 3 - Circular chart for multiple hierarchical command and control process with enhanced relevance of coordination

6.3.2 Proses koordinasi

Organisasi harus menetapkan proses komando dan pengendalian yang bersifat multi-hierarki untuk mencapai koordinasi terbaik di antara organisasi yang terlibat. Proses ini harus menghormati perjanjian kerja sama yang sudah ada.

Organisasi yang terlibat harus mengevaluasi, dan jika dianggap tepat dan layak, harus mengupayakan organisasi lain agar berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi organisasi lain tersebut.

Semua organisasi harus memberitahu organisasi lain tentang keputusan yang diambil yang dapat mempengaruhi mereka.

Proses komando dan pengendalian multi-hierarki harus mencakup hal berikut ini.

a) Koordinasi lapangan dini
 Para responden pertama di lapangan harus melaksanakan koordinasi dini berdasarkan pengalaman dan kapasitas orang yang ada.Penanganan insiden awal dapat menjadi sangat penting untuk penyelamatan jiwa/infrastruktur dan perlindungan manusia dari paparan bahaya tambahan.Koordinasi lapangan dini ini nantinya harus digantikan oleh koordinasi yang terencana dan berkelanjutan yang dibentuk oleh komando dan pengendalian.

b) Partisipasi
 Semua organisasi yang terlibat dalam koordinasi harus berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan, prosedur, strategi dan rencana yang akan mempengaruhi mereka. Koordinator harus bertindak sedemikian rupa sehingga kepercayaan diri pelaku lain tetap terjaga.

c) Kesetaraan
 Koordinasi harus menjamin keadilan dalam pengoperasian dan harus menghormati kompetensi dan kesamaan kesempatan dari semua pelaku yang terlibat.

6.3.3 Tujuan koordinasi

Organisasi harus memastikan dan memprioritaskan tujuan untuk mencapai koordinasi berkelanjutan yang efektif di semua tingkat operasional.

Organisasi harus mengkaji tujuan koordinasi berikut ini yang berkaitan dengan kegiatan penanganan insiden yang sebenarnya, dan harus mengevaluasi penerapannya:

a) pembentukan struktur komando dan pengendalian;
b) identifikasi prosedur pengambilan keputusan umum dan transparan;
c) pelaksanaan kebijakan terkait dengan berbagi informasi dan kesadaran situasional;
d) pelaksanaan rencana aliran komunikasi dan pedoman komunikasi;
e) pembagian tugas operasional;
f) persiapan dan pelaksanaan jaringan dukungan logistik;
g) penetapan batas-batas (geografis dan bidang tanggung jawab) antara organisasi yang berbeda;
h) pelaksanaan manajemen sumber daya khusus;
i) interoperabilitas komunikasi, jaringan geografis dan manajemen informasi;
j) identifikasi kebutuhan mendesak;
k) kelangsungan dari proses koordinasi, dengan memperhitungkan pergantian staf.

6.3.2 Coordination process

The organization shall establish a multi-hierarchical command and control process to achieve the best possible coordination among the involved organizations. This process shall respect existing cooperation agreements.

The involved organizations shall evaluate and, as considered appropriate and feasible, enable other organizations to participate in their decision-making for decisions that can affect them.

All organizations shall inform other organizations about decisions taken that can affect them. The multi-hierarchical command and control process shall include the following.

a) Early field coordination
The first responders in the field shall implement an early field coordination based on available human capacity and experience. The initial incident response can be critical for saving lives/infrastructure and protection of people from being exposed to additional danger. This early field coordination shall later be replaced by planned and sustained coordination set up by command and control.

b) Participation
All organizations involved in coordination shall participate in deciding policies, procedures, strategies and plans which will affect them. The coordinators shall act in such a way that the confidence of the other actors is maintained.

c) Equity
Coordination shall ensure fairness in operations and shall respect the competencies and equal opportunities of all involved actors.

6.3.3 Coordination objectives

The organization shall ensure and prioritize objectives to achieve effective sustained coordination at all operational levels.

The organization shall assess the following coordination objectives with regard to the actual incident response activity, and shall evaluate their applicability:

a) establishment of a command and control structure;
b) identification of common and transparent decision-making procedures;
c) implementation of an information sharing and situational awareness policy;
d) implementation of a communication flow plan and communication guidelines;
e) division of operational tasks;
f) preparation and implementation of a logistic support network;
g) setting of boundaries (geographical and areas of responsibility) between the different organizations;
h) interoperability of communication, geographic and information management network;
i) identification of critical needs;
j) continuity of the coordination process, taking account of staff turnover.

6.4 Berbagi informasi

Berbagi informasi adalah dasar untuk koordinasi dan kerja sama, dan harus berdasarkan kepercayaan antara organisasi yang terlibat. Keberhasilan penanganan insiden bersama multi-organisasi atau multinasional tergantung pada informasi yang tepat waktu dan akurat dan berbagi informasi operasional yang efektif.

Informasi operasional yang paling tepat waktu dan akurat adalah hasil dari integrasi bersama antar-lembaga dan informasi operasional multinasional.Integrasi bersama ini lebih baik daripada upaya organisasi tunggal.

Untuk semua informasi yang perlu dibagi, organisasi harus menetapkan sarana untuk memungkinkan berbagi informasi yang sesuai dengan peristiwa aktual dan organisasi yang terlibat.

Organisasi harus menilai kebutuhan berbagi informasi sebagai berikut.

a) Lingkungan berbagi informasi
 Penciptaan lingkungan berbagi informasi operasional (terdiri dari gambaran operasi umum, kesadaran situasional yang lebih baik).
b) Kesatuan upaya
 Personel dari setiap organisasi perlu untuk melihat situasi dari sudut pandang antar-lembaga atau multinasional, dan juga dari perspektif mereka sendiri.
c) Penyesuaian untuk menyelesaikan perbedaan yang signifikan
 Perbedaan doktrin dan prosedur di antara berbagai organisasi yang ambil bagian dalam penanganan insiden dapat terjadi.Kunci untuk informasi operasional antar-lembaga atau multinasional yang efektif adalah kesiapan, mulai dari komando tingkat tertinggi, untuk membuat penyesuaian yang diperlukan bagi penyelesaian perbedaan yang signifikan.
d) Perencanaan pengolahan-informasi
 Kebutuhan untuk menentukan informasi operasional yang dapat dipergunakan bersama organisasi lain pada awal proses perencanaan dan bagaimana sebaiknya berbagi informasi.
e) Operasi penanganan insiden pelengkap
 Kebutuhan untuk berbagi informasi operasional tentang kegiatan operasional pelengkap dari organisasi yang bekerja sama.
f) Bahasa atau simbologi
 Kebutuhan untuk membuat suatu bahasa bersama atau simbologi.

6.5 Faktor manusia

Ketika menentukan dan merancang struktur organisasi, sistem dan peralatan (terutama untuk penggunaan multi-lembaga dan lintas batas), harus dipertimbangkan perbedaan, misalnya dalam hal tingkat kompetensi, latar belakang budaya, protokol operasi dan bahasa.

CATATAN Dalam situasi seperti ini biasanya diasumsikan level pelatihan terendah.

6.4 Information sharing

Information sharing is the basis for coordination and cooperation, and needs to be based on trust between the involved organizations. The success of joint multi-organizational or multinational incident response depends on timely and accurate information and effective operational information sharing.

The most timely and accurate operational information is the result of the unified integration of interagency and multinational operational information. This unified integration surpasses any single organization's effort.

For all information that needs to be shared, organizations shall establish the means to enable information sharing appropriate to the actual incident and the organizations involved.

The organization shall assess information-sharing needs as follows.

a) Information-sharing environment
 Creation of an operational information-sharing environment (composed of a common operating picture, an enhanced situational awareness).
b) Unity of effort
 Personnel of each organization need to view the situation from interagency or multinational viewpoint, as well as from their own perspectives.
c) Adjustments to resolve significant differences
 Differences in doctrine and procedures among the various organizations taking part in incident response may occur. A key to effective interagency or multinational operational information is readiness, beginning with the highest levels of command, to make the adjustments required to resolve significant differences.
d) Information-processing planning
 The need to determine the operational information that may be shared with other organizations early in the planning process and how it should be shared.
e) Complementary incident response operations
 The need to share operational information about complementary operational activities of cooperating organizations.
f) Language or symbology
 The need to set up a common language or symbology.

6.5 Human factors

When specifying and designing organizational structures, systems and equipment (especially for multi-agency, cross-border use), account shall be taken of differences such as competency levels, cultural backgrounds, operating protocols and languages.

NOTE It is usual in these situations to assume the lowest level of training.

Lampiran A
(informatif)

Contoh-contoh

A.1 Struktur komando dan pengendalian

Persyaratan untuk struktur komando dan pengendalian disebutkan dalam butir 4.2.3.

Tabel A.1 - Contoh cara membagi struktur komando dan pengendalian menjadi beberapa level yang berbeda

Rentang komando	Tingkat komando	Uraian	Bantuan
Strategis	Normatif	Tingkat pemerintahan pusat dan daerah yang beroperasi sesuai dengan tuntutan penanganan insiden untuk memantau, membantu atau mengintervensi	Administratif (misalnya transport, manjemen limbah, bagian pendidikan, jasa sosial, jasa penunjang keuangan)
	Komando operasi strategis, kebijakan dan tujuan	Para kepala yuridiksi, misalnya walikota pelaksana, dan para kepala lembaga penanganan insiden, pengambil keputusan operasional tingkat akhir	
Taktis	Komando, pengendalian, koordinasi kerja sama insiden	Level komando insiden dari tiap organisasi yang terlibat	
	Pengendalian tingkat tugas dari operasi	Pengendalian dan operasi penunjang di lapangan (kru dan sektor/divisi, dan pada tingkat setara di fungsi-fungsi penunjang)	

CATATAN 1 Tujuan dari komponen taktis dan strategis adalah agar dapat membuat keputusan yang ampuh dan menyeluruh pada saat yang tepat dengan mempertimbangkan semua aspek yang diperlukan dalam wilayah kritis-waktu dari insiden, seperti dicontohkan pada Tabel A.1

CATATAN 2 Tujuan dari komponen administratif pada level strategis adalah agar bidang dan institusi administratif yang tidak terlibat langsung dalam penanganan insiden dapat masuk ke dalam “loop”, agar mereka dapat membantu dalam upaya kembali ke kondisi normal secepat mungkin .

Annex A
(informative)

Examples

A.1 Command and control structure

The requirements for command and control structure are specified in 4.2.3.

Table A.1 -Example of how to divide command and control structure into different levels

Command band	Command level	Description	Support
Strategic	Normative	State and national/federal government levels which operate according to the demands of the incident to either monitor, support or to intervene	Administrative (e.g. transport, waste management, education department, social services, financial support services)
	Command of strategic operations, policy and objectives	Heads of jurisdictions, e.g. the executive mayor, and chiefs of individual response agencies, the final operational decision-makers	
Tactical	Incident command, control, coordination cooperation	Incident command level of each participating organization	
	Task level control of operations	Control and support operation on the ground (crews and sectors/divisions, and at equivalent levels in support functions)	

NOTE 1 The objective of the strategic and tactical components is to be able to make comprehensive and effective decisions in a timely manner taking into account all necessary aspects under the time-critical regime of the incident, as shown exemplarily in Table A.1.

NOTE 2 The objective of the administrative component on a strategic level is to bring administrative departments and institutions not directly involved in the strategic incident response "into the loop", to enable them to assist in the return to normal conditions as quickly as possible.

A.2 Tingkat penanganan insiden

Persyaratan untuk tingkat penanganan insiden ditentukan dalam butir 4.2.4.

Tabel A.2 - Contoh pengkategorian tingkat insiden yang ditentukan oleh sumber daya yang dikerahkan

Tingkat insiden	Keterangan tentang tingkat insiden	Tingkat komando
Tingkat 1	Peristiwa dapat ditangani oleh sumber daya yang dikerahkan pada awal keputusan penanganan.	Taktis: tingkat tugas mungkin dipantau dan ditunjang oleh koordinasi taktis
Tingkat 2	Peristiwa dapat ditangani oleh sumber daya yang dikerahkan hanya oleh organisasi yang terkena.	Komando dan koordinasi taktis
Tingkat 3	Peristiwa dapat ditangani oleh sumber daya yang dikerahkan oleh organisasi yang terganggu, dibantu oleh organisasi tetangga pada kesepakatan normal.	Komando dan koordinasi strategis dari operasi di wilayah yuridiksi
Tingkat 4	Peristiwa dapat ditangani oleh sumber daya yang dikerahkan oleh organisasi yang terganggu, dibantu oleh organisasi di manapun di wilayah jurisdiksi yang terken. Bantuan ini dapat diperoleh melalui penggunaan pusat koordinasi pemerintahan setempat	Komando strategis di wilayah dan lintas yuridiksi Mungkin dipantau oleh strategis besar
Tingkat 5	Mencakup manjemen dari bantuan manapun yang datang untuk membantu organisasi menangani suatu peristiwa dan akan difasilitasi oleh pemerintah yang terkena, menggunakan protokol yang ada dari traktat bilateral dan organisasi internasional	Komando strategis di wilayah dan lintas yuridiksi, kadang membutuhkan bantuan danbahkan intervensi strategis besar

A.2 Levels of incident response

The requirements for levels of incident response are specified in 4.2.4.

Table A.2- Example of how to categorize incident levels specified by resources deployed

Incident level	Description of incident level	Command level
Level 1	Event can be dealt with by resources deployed on the initial predetermined response.	Tactical: task level perhaps monitored and supported by tactical coordination
Level 2	Event can be dealt with by resources deployed solely by the affected organization.	Tactical command and coordination
Level 3	Event can be dealt with by resources deployed by the affected organization, supported by mutual aid assistance from neighbouring organizations under normal arrangements.	Strategic command and coordination of operations within the jurisdictions
Level 4	Event can be dealt with by resources deployed by the affected organization, supported by mutual assistance from organizations anywhere within the affected geographical jurisdiction. This assistance may be obtained through the use of a local governmental coordination centre.	Strategic command within and across the jurisdictions Probably monitored by grand strategic
Level 5	Covers the management of any incoming aid to help the organization respond to an event and will be facilitated by the affected government, using the existing protocols of bilateral treaties and international organizations.	Strategic command within and across the jurisdictions, sometimes requiring the support and even intervention of grand strategic

© BSN 2012

A.3 Pengolahan dan eksploitasi

Persyaratan untuk pengolahan dan eksploitasi disebutkan dalam butir 5.2.4.

Skala yang disajikan dalam contoh pada Tabel A.3 dan Tabel A.4 bukan derajat akurasi progresif; melainkan hanya membantu untuk merumuskan kredibilitas informasi yang diterima. Huruf dan angka adalah bebas satu sama lain dan memberikan evaluasi keseluruhan informasi. Sebagai contoh, sebuah sumber yang dikenal dapat diandalkan (E) mungkin memberikan informasi yang akurat yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber lain dan karena itu diberi peringkat E1.Selain itu, laporan yang dinilai sebagai F6 mungkin benar-benar akurat dan tidak boleh sewenang-wenang ditolak.

Tabel A.3 - Contoh cara penggolongan kehandalan sumber

Nilai	Penjelasan
A	**Sangat dipercaya** – sumber yang sudah diuji-coba, dapat dipercaya penuh. Sangat jarang ada
B	**Biasanya dipercaya** – sumber yang dipercaya di masa lalu tapi masih ada unsur keraguan dalam kasus tertentu. Digunakan bagi sumber yang dikenal integritasnya, misalnya lembaga PBB, lembaga militer, beberapa LSM terkemuka, dll.
C	**Boleh dipercaya** – sumber yang kadang digunakan di masa lalu dan oleh karena itu dapat dijadikan landasan. Mungkin berlaku bagi beberapa kantor berita dan LSM.
D	**Tidak selalu dipercaya** – sumber yang dipercaya di masa lalu tapi telah terbukti lebih sering untuk tidak dipercaya. Mungkin berlaku bagi beberapa kantor berita dan LSM.
E	**Tidak meyakinkan** – sumber yang telah dipercaya di masa lalu dan terbukti tidak meyakinkan.
F	**Kehandalannya tidak bisa dipastikan** – sumber yang tidak pernah digunakan di masa lalu.

Tabel A.4 - Contoh cara penggolongan kredibiltas informasi

Nilai	Penjelasan
1	**Diperkuat oleh sumber lain** – berlaku apabila suatu sumber lain dari sumber pertama yang melaporkan suatu informasi yang ada membenarkan informasi tersebut.
2	**Mungkin benar** – menunjukkan konfirmasi bagian penting dari informasi yang dilaporkan oleh satu sumber lain. Citra udara biasanya termasuk ke dalam kategori ini.
3	**Bisa jadi benar** – investigasi atas suatu fakta atau tindakan yang terlaporkan telah terungkap tidak ada informasi lebih jauh; namun, informasinya sesuai dengan tindakan atau latar belakang informasi yang tersedia.
4	**Meragukan** – potongan informasi yang cenderung konflik dengan informasi yang dilaporkan dan divalidasi sebelumnya
5	**Tidak mungkin benar** – potongan informasi yang secara meyakinkan kontradiksi dengan informasi yang dilaporkan dan divalidasi sebelumnya
6	**Kebenarannya tidak bisa dipastikan –** potongan informasi yang baru saja dilaporkan yang tidak bisa dibandingkan dengan sumber kategori yang lain. Digunakan apabila Nilai 1 sampai 5 tidak bisa diterapkan. Sebaiknya digunakan nilai 6 ketimbang nilai 1 sampai 5 yang tidak akurat.

A.3 Processing and exploitation

The requirements for processing and exploitation are specified in 5.2.4.

The scales presented in the examples given by Table A.3 and Table A.4 are not progressive degrees of accuracy; they only help to formalize the credibility of information received. The letters and numerals are independent of each other and give an overall evaluation of the information. For example, a source known to be unreliable (E) might provide accurate information which is confirmed by other sources and therefore given the rating of E1. Additionally, a report evaluated as F6 may be totally accurate and should not be arbitrarily rejected.

Table A.3 - Example of how to rate reliability of sources

Rating	Description
A	**Completely reliable** — a tried and tested source which can be depended upon with confidence. These are extremely rare.
B	**Usually reliable** — a source which has been successful in the past but for which there is still some element of doubt in a particular case. Used for those of known integrity such as UN agencies, military imagery, some major NGOs, etc.
C	**Fairly reliable** — a source which has occasionally been used in the past and upon which some degree of confidence can be based. Could be applied to some press sources and NGOs.
D	**Not usually reliable** — a source which has been used in the past but has proved more often than not to be unreliable. Could be applied to some press sources and NGOs.
E	**Unreliable** — a source which has been used in the past and has proved unworthy of any confidence.
F	**Reliability cannot be judged** — a source which has not been used in the past.

Table A.4 - Example of how to rate credibility of information

Rating	Description
1	**Confirmed by other sources** — applicable when a source different from that originally reporting a piece of already existing information confirms that information.
2	**Probably true** — indicates confirmation of essential parts of information reported by another source. Aerial imagery is usually included in this category.
3	**Possibly true** — investigation of a reported fact or action has revealed no further information; however, the information is compatible with previous actions or background information available.
4	**Doubtful** — an item of information that tends to conflict with previously reported and validated information.
5	**Improbable** — an item of information that positively contradicts previously reported and validated information.
6	**Truth cannot be judged** — any freshly reported item of information that cannot be compared with any other category's source. It is used when ratings 1 to 5 cannot be applied. It is preferable to use a rating of 6 rather than an inaccurate 1 to 5 rating.

Lampiran B
(normatif)

Kriteria proses informasi operasional

B.1 Umum

Lampiran ini berisi penjelasan dan persyaratan lebih lanjut mengenai hal yang ditentukan dalam butir 5.3.

B.2 Kualitas

Kualitas output sangat penting untuk keberhasilan tindakan penanganan dan keberhasilan komandan insiden dalam mengambil keputusan yang tepat. Untuk mencapai standar kualitas tertinggi, informasi operasional harus memiliki karakteristik sebagai berikut.

a) Antisipatori
Informasi operasional harus mengantisipasi kebutuhan komandan insiden untuk memberikan landasan bagi perencanaan operasional dan pengambilan keputusan.Mengantisipasi kebutuhan berarti staf harus mengenali dan memahami sepenuhnya aliran perintah/komando dan tujuan misi utama, serta aspek lingkungan operasional yang relevan.

b) Tepat waktu
Informasi operasional harus tersedia bila diminta oleh komandan insiden.Informasi operasional yang tepat waktu memungkinkan komandan insiden untuk mengantisipasi peristiwa di daerah operasional, sehingga memungkinkan komandan insiden untuk mengatur waktu operasi demi mencapai efektivitas maksimum dan menghindari pelaksanaan yang tidak matang.

c) Akurat
Informasi operasional harus benar, membawa fakta dan situasi sebagaimana adanya, dan berisi estimasi terbaik tentang situasi berdasarkan evaluasi mendalam terhadap semua informasi yang tersedia. Keakuratan output informasi operasional dapat ditingkatkan dengan menempatkan penekanan secara proporsional lebih besar pada informasi yang dilaporkan oleh sumber yang paling dapat diandalkan. Keandalan sumber harus dievaluasi melalui proses umpan balik.

d) Bermanfaat
Informasi operasional harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari komandan insiden, dan disediakan dalam bentuk yang sesuai agar langsung dipahami.Komandan insiden harus dapat dengan cepat menerapkan informasi operasional untuk tugas terdekat yang harus segera ditangani.Menyediakan informasi operasional yang bermanfaat mengharuskan pemberi informasi tersebut untuk memahami lingkungan tempat informasi tersebut digunakan.

e) Lengkap
Informasi operasional harus memenuhi kebutuhan komandan insiden semaksimal mungkin dan cukup jelas bagi komandan insiden apa yang masih belum diketahui.

f) Relevan
Informasi operasional harus terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan operasi terdekat yang harus segera ditangani untuk membantu komandan insiden dalam penyelesaian tujuan misi.Informasi operasional memberikan kontribusi bagi pemahaman komandan insiden tentang situasi, tapi tidak membebani komandan insiden dengan informasi operasional yang minimal atau tidak penting untuk misi saat ini.

AnnexB
(normative)

Operational information process criteria

B.1 General

This annex gives explanations and requirements further to those specified in 5.3.

B.2 Quality

The quality of outputs is paramount to the success of response operations and the incident commander's success in taking the right decisions. To achieve the highest standards of quality, operational information shall have the following characteristics.

a) Anticipatory
Operational information anticipates the needs of the incident commander to provide a foundation for operational planning and decision-making. Anticipating needs requires staff to identify and fully understand the command current and potential mission objectives, and the relevant aspects of the operational environment.

b) Timely
Operational information is available when required by the incident commander. Timely operational information enables the incident commander to anticipate events in the operational area. This, in turn, enables the incident commander to time operations for maximum effectiveness and to avoid being taken unawares.

c) Accurate
Operational information is correct, conveys an appreciation for facts and the situation as it actually exists, and provides the best possible estimate of the situation based on sound evaluation of all the information available. The accuracy of operational information outputs may be enhanced by placing proportionally greater emphasis on information reported by the most reliable sources. Source reliability should be evaluated through a feedback process.

d) Usable
Operational information is tailored to the specific needs of the incident commander, and is provided in forms suitable for immediate comprehension. The incident commander shall be able to quickly apply operational information to the task at hand. Providing useful operational information requires the producers to understand the circumstances under which their outputs are used.

e) Complete
Operational information answers the incident commander's questions as fully as possible. It also tells the incident commander what remains unknown.

f) Relevant
Operational information is relevant to the planning and execution of the operation at hand. It aids the incident commander in the accomplishment of the mission objective. Operational information contributes to the incident commander's understanding of the situation, but does not burden the incident commander with operational information that is of minimal or no importance to the current mission.

© BSN 2012

CATATAN 1 Komandan insiden menyampaikan tujuan dan strategi kepada staf informasi operasional.Persyaratan diperbarui dan disempurnakan menurut perkembangan situasi.

g) Objektif
Informasi operasional harus bersifat tidak memihak, tidak termanipulasi dan bebas dari penilaian merugikan.

h) Tersedia
Informasi operasional harus mudah diakses oleh komandan insiden.Ketersediaan adalah fungsi yang tidak saja harus tepat waktu dan bermanfaat, tetapi juga harus memiliki ketepatan klasifikasi keamanan, kemudahan untuk dioperasikan bersama dan keterkaitan.

CATATAN 2 Informasi operasional disimpan pada tingkat kerahasiaan serendah mungkin, sehingga memaksimalkan kemampuan untuk diakses.

B.3 Sudut pandang

Informasi operasional harus memberikan fakta menyeluruh tentang situasi yang dihadapi. Tantangan harus dikenali agar dimungkinkan perumusan yang jelas tentang tujuan dan strategi yang terkait dan dapat dicapai, penentuan, perencanaan, dan pelaksanaan operasi yang akan membantu keberhasilan tindakan penanganan.

B.4 Penyelarasan

Informasi operasional harus diselaraskan dengan kegiatan dan rencana penanganan agar memenuhi persyaratan untuk mempengaruhi keputusan pada waktunya.Perencanaan dan arah informasi operasional, berikut pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan, analisis dan produksi, serta diseminasinya harus dilakukan dengan waktu cukup untuk memungkinkan penggabungan hasil dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

Untuk menghindari informasi operasional yang "terlambat", (ini merupakan kesalahan umum dalam upaya untuk menyelaraskan informasi operasional dengan operasi dan rencana), maka harus disediakan waktu yang cukup untuk memproduksi informasi operasional dalam mendukung pengambilan keputusan.

B.5 Integritas

Integritas mengharuskan kedekatan kepada fakta dan kebenaran cara penafsiran serta penyajian fakta tersebut. Metodologi, produksi, dan penggunaan informasi operasional tidak boleh diarahkan atau dimanipulasi untuk disesuaikan dengan hasil yang diinginkan, dengan posisi kelembagaan, prasangka tentang suatu situasi atau tujuan yang telah ditentukan, operasi, atau metode operasi.

B.6 Koordinasi dan kerja sama

Koordinasi dan kerja sama akan mengarah pada kepentingan bersama untuk mencapai tujuan misi yang diinginkan. Kesatuan upaya ini sangat penting untuk proses informasi operasional yang efektif, agar mengurangi tumpang-tindih yang tidak perlu dalam pengumpulan dan produksi informasi operasional.

NOTE 1 Incident commanders communicate objectives and strategy to the operational information staff. Requirements are updated and refined as the situation evolves.

g) Objective
Operational information is unbiased, undistorted and free of prejudicial judgments.

h) Available
Operational information is readily accessible to the incident commander. Availability is a function of not only timeliness and usability, but also appropriate security classification, interoperability and connectivity.

NOTE 2 Operational information is kept at the lowest level of classification possible with the least restrictive releasability caveat, thereby maximizing accessibility.

B.3 Perspective

Operational information shall provide a comprehensive understanding of the situation faced. It is essential to recognize challenges to allow clear formulation of relevant and attainable objectives and strategy, determining, planning, and conducting operations that will help the successful conduct of response operations.

B.4 Synchronization

Operational information shall be synchronized with response activities and plans in order to provide answers to requirements in time to influence the decision they are intended to support. Operational information planning and direction, collection, processing and exploitation, analysis and production, and dissemination shall be accomplished with sufficient lead time to permit the integration of the output in decision-making and execution.
To avoid “late” operational information, a common error in attempting to synchronize operational information with operations and plans, sufficient lead time for operational information production to support decision making should be allowed.

B.5 Integrity

Integrity requires adherence to facts and truthfulness in the way those facts are interpreted and presented. The methodology, production, and use of operational information shall not be directed or manipulated to conform to a desired result, institutional position, preconceptions of a situation or predetermined objective, operation, or method of operation.

B.6 Coordination and cooperation

Coordination and cooperation leads to common interests to achieve desired mission objectives. This unity of effort is essential to an effective operational information process, reducing unnecessary redundancy and duplication in operational information collection and production.

B.7 Pengutamaan

Pengutamaan pilihan dalam upaya pengumpulan dan analisis adalah aspek penting perencanaan.Pengutamaan pilihan memungkinkan mekanisme untuk memenuhi persyaratan dan secara efektif mengelola risiko dengan mengidentifikasi tugas yang paling penting dan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pengguna informasi operasional (misalnya komandan insiden atau pengambil keputusan) harus mendorong upaya pengutamaan pilihan dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi operasional dan tingkat pentingnya kebutuhan tersebut.

B.8 Prediksi

Informasi operasional juga memberikan prakiraan kejadian yang mungkin berkembang.Jika ada unsur informasi yang tidak cukup atau tidak pasti sebagai dasar prakiraan, staf informasi operasional harus menjamin bahwa komandan insiden menyadari kekurangan ini.

B.9 Kelincahan

Struktur, metodologi, kumpulan data, hasil dan personel untuk informasi operasional harus cukup gesit dan lentur untuk mengikuti perubahan situasi, kebutuhan, prioritas dan kesempatan.

Kunci untuk mencapai kegesitan adalah persiapan dan pengorganisasian untuk semua kemungkinan. Mempertahankan kewaspadaan dalam keadaan seperti itu membutuhkan kesadaran yang cukup besar dan pandangan ke depan.

B.10 Kerjasama

Berdasarkan sifatnya, informasi operasional adalah tidak sempurna (artinya semuanya tidak dapat diketahui, analisis rentan terhadap penipuan, dan informasi terbuka untuk multi-tafsir).Cara terbaik untuk menghindari ketidaksempurnaan informasi dan mencapai tingkat kehandalan yang lebih tinggi adalah dengan berkonsultasi dan meminta pendapat para analis dan ahli lainnya, terutama yang ada di organisasi eksternal.

B.11 Fusi/Penggabungan

Penggabungan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan informasi dari semua sumber dan disiplin informasi operasional yang tersedia untuk menghasilkan penilaian selengkap mungkin mengenai situasi.

B.7 Prioritization

Prioritization of collection and analysis efforts are vital aspects of planning. Prioritization offers a mechanism for addressing requirements and effectively managing risk by identifying the most important tasks and applying available resources against those tasks.

Operational information consumers (e.g. incident commanders or decision-makers) should drive the prioritization effort by identifying the operational information needs and the relative importance of those needs.

B.8 Prediction

Operational information also provides a forecast of possible evolution. If there are inadequate or uncertain elements of information upon which to base forecasts, the operational information staff shall ensure that the incident commander is aware of this shortcoming.

B.9 Agility

Structures, methodologies, databases, products and personnel for operational information shall be sufficiently agile and flexible to meet changing situations, needs, priorities and opportunities.

The key to achieving agility is advance preparation and organization for all contingencies. Maintaining responsiveness under such circumstances requires considerable awareness and foresight.

B.10 Collaboration

By its nature, operational information is imperfect (i.e. everything cannot be known, analysis is vulnerable to deception, and information is open to alternative interpretations). The best way to avoid these obstacles and achieve a higher degree of fidelity is to consult with, and solicit the opinions of, other analysts and experts, particularly in external organizations.

B.11 Fusion

Fusion is the process of collecting and examining information from all available sources and operational information disciplines to derive as complete an assessment as possible of the situation.

© BSN 2012

Bibliografi

ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities — General vocabulary

ISO 9000:2005, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9241 (all parts), Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)

ISO 11064 (all parts), Ergonomic design of control centres

ISO/PAS 22399:2007, Societal security — Guideline for incident preparedness and operational continuity management

ISO Guide 73:2009, Risk management — Vocabulary

International Red Cross Society and Red Crescent Society, Introduction to the guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance2)

Diterbitkan oleh the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, P.O. Box 372, CH-1211 Geneva 19,Switzerland; tersedia di http://www.ifrc.org/what/disasters/idrl/resources/guidelines.asp.

© BSN 2012

Bibliography

ISO/IEC Guide 2, Standardization and related activities — General vocabulary

ISO 9000:2005, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9241 (all parts), Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)

ISO 11064 (all parts), Ergonomic design of control centres

ISO/PAS 22399:2007, Societal security — Guideline for incident preparedness and operational continuity management

ISO Guide 73:2009, Risk management — Vocabulary

International Red Cross Society and Red Crescent Society, Introduction to the guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance2)

Issued by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, P.O. Box 372, CH-1211 Geneva 19,Switzerland; available at http://www.ifrc.org/what/disasters/idrl/resources/guidelines.asp.

© BSN 2012